BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Dede supardi bin H. Supriadi, pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di PT. Vega Data Indonesia atau PT. Barracuda Fintech Indonesia di ruko pluit village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan juga pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Awalnya di bulan agustus 2019 saksi korban Mahdi ibrahim menerima pesan SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) yang menawarkan pinjaman uang secara online (via internet) kepada saksi korban, kemudian karena saksi korban sedang membutuhkan uang maka saksi korban mengklik link yang ada di SMS tersebut, kemudian saksi korban langsung dialihkan ke playstore (aplikasi) dan disuruh mengunduh aplikasi dompet kartu, setelah saksi korban klik ok untuk mengunduhnya, kemudian dalam aplikasi tersebut keluar registrasi sebagai persyaratan untuk dapat melakukan pinjaman secara online dengan mencantumkan

nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor telepon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga, setelah itu saksi korban diminta / diarahkan untuk foto KTP dan foto selfi (foto diri sendiri dengan menggunakan handphone) agar terlihat wajah saksi korban. Setelah saksi korban mendownload aplikasi dompet kartu tersebut dan melengkapi persyaratan tersebut, kemudian saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu tersebut dengan pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah pinjaman saksi korban disetujui oleh dompet kartu namun saksi korban hanya menerima sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), kemudian pinjaman tersebut akan saksi korban lunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Namun kurang dari H-1 (kurang satu hari) jatuh tempo pembayaran ada seseorang (terdakwa) yang menelpon saksi korban untuk mengingatkan bahwa pinjaman saksi korban akan jatuh tempo pembayarannya.

Selanjutnya pada tanggal 08 November 2019 ada seseorang (terdakwa) yang menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban “kapan pinjaman saksi korban akan dilunasi”, dan pinjaman saksi korban telah dikenakan denda, sehingga saksi korban harus melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp.7.960.000,- (tujuh juta Sembilan puluh enam ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 03 Desember 2019 saksi korban menerima whatsapp dari nomor 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, dan mengancam saksi korban dengan perkataan kalau tidak bayar dan tidak ada bukti bayar, seseorang tersebut

(terdakwa) akan menelpon atau menghubungi keluarga saksi korban dan refrensi terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan saksi korban saat melengkapi persyaratan pinjaman tersebut, Yang mana ancaman tersebut yaitu seseorang (terdakwa) memberitahukan bilamana saksi korban mempunyai hutang namun tidak membayarnya. Karena seseorang (terdakwa) telah menelpon atau menghubungi keluarga saksi korban dan teman teman saksi korban, lalu pada tanggal 05 Desember 2019 saksi korban menghubungi telpon via whatsapp dengan nomor 083876031045, lalu saksi korban menanyakan apa sebab istri saksi korban dan teman teman saksi korban ditelpon, setelah itu telpon saksi korban tidak aktif. Kemudian pada hari itu juga saksi korban kembali menghubungi dompet kartu dan mengatakan "kamu mau telpon siapa lagi selain istri saya dan teman-teman saya" akan tetapi seseorang (terdakwa) balas dengan kata kasar "terserah gua, anjing lu". Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, seseorang (terdakwa) menghubungi saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan percakapan (*Chat*) dengan kata-kata kasar dan mengancam yaitu "akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, malam ini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan".

Berdasarkan keterangan ahli perlindungan konsumen yaitu Ephraim J.K. Caraen, S.H., M.Hum. Diketahui pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha

dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman online melalui aplikasi dompet kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan informasi digital adalah janji yang dinyatakan secara tertulis kepada konsumen. Namun janji tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin operasional dari OJK (otoritas jasa keuangan). Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui aplikasi dompet kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman online tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK (otoritas jasa keuangan) untuk menjalankan usaha jasa pinjaman online. Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki izin operasional dari OJK (otoritas jasa keuangan).

Berdasarkan keterangan ahli ITE yaitu Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH bahwa perkataan terdakwa Dede Supardi pada saat melakukan penagihan kepada konsumen sudah memenuhi unsur memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang

Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mana perbuatan terdakwa Dede Supardi dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat sistem elektronik melalui whatsapp dengan mengirimkan dan mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa *voice note* yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri saksi korban dan keluarga saksi korban.

Berdasarkan keterangan ahli otoritas jasa keuangan yaitu Alvin leonardo ezra. T. Bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di OJK (otoritas jasa keuangan) bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak terdaftar dan tidak mendapatkan izin dari OJK (otoritas jasa keuangan) selaku penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) di Indonesia dan semestinya PT. Barracuda Fintech Indonesia sebagai layanan jasa keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Dan juga apa yang ditulis oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia pada perjanjian layanan dengan menjelaskan bahwa aplikasi tunai shop maupun kascas telah diatur dan diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) untuk meyakinkan kepada calon nasabah atau masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan publik hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah atau masyarakat menganggap bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku layanan jasa

keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan fintech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencatup semua nomor kontak telephone yang ada dikontak telephone nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat direktur pengaturan, Perizinan, dan pengawasan fintech nomor : S-72 / NB .213 / 2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada smartphone pengguna fintech lending. Yang diperbolehkan oleh perusahaan fintech hanya untuk mengakses kamera, lokasi (*GPS-location an GSM-IMEI*) dan mikrofone, selain 3 (tiga) akses tersebut tidak diperbolehkan. Untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawan (terdakwa) dibagian *desk collection* PT. Vega Data Indonesia dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam buku pedoman perilaku pemberian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab pada bulan Nopember 2018. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) Junto pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

B. Amar Putusan

Menyatakan terdakwa Dede supardi bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik juga dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan serta pengancaman”. Sebagaimana dalam dakwaan kedua juga menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan kemudian menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi 7 RAM 3GB memori internal 32GB warna hitam (yang disita dari Bayu prasetya) yang dipergunakan dalam perkara lain, 1 (satu) unit Handphone Realme warna merah biru nomor Handphone 081546121647 (yang disita dari Dede supardi bin H. Supriadi), 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede supardi bin H. Supriad), Dirampas untuk dimusnahkan, serta membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).